



Mahbub Djunaidi, *Seniman* Politik Nahdlatul Ulama (1960-1987)

Farhan Nugraha*¹, Muhammad Fakhruddin¹, Humaidi¹

*Corresponding author Email: farhan_nugraha@outlook.com

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini lahir tentu dari para tokoh-tokoh besar yang menggawangnya, salah satunya Mahbub Djunaidi. Kemampuan politiknya diperoleh dari berbagai pengalaman organisasi dan kemampuan dalam kepenulisan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana riwayat politik Mahbub Djunaidi sebagai aktivis politik Nahdlatul Ulama pada tahun 1960-1987. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perjalanan politik Mahbub Djunaidi (1960-1987). Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode historis yang terdiri dari tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mahbub Djunaidi memiliki konsep *khittah plus*. Demokrasi politik ala Mahbub Djunaidi adalah cita-cita demokrasi yang diperjuangkan melalui garis politik.

Kata Kunci: Mahbub Djunaidi, Demokrasi Politik, Nahdlatul Ulama.

Mahbub Djunaidi, Political Artist of Nahdlatul Ulama (1960-1987)

Abstract: Nahdlatul Ulama is one of the largest Islamic organizations in Indonesia. This organization was born of course from the big figures who oversee it, one of them Mahbub Djunaidi. His political abilities are obtained from various organizational experiences and abilities in writing. The problem raised in this research is how the political history of Mahbub Djunaidi as a political activist of Nahdlatul Ulama in 1960-1987. Based on these problems, this study aims to describe the political journey of Mahbub Djunaidi (1960-1987). Based on the problems and objectives of the research, the method used is the historical method which consists of heuristics, source criticism, interpretation and historiography stages. The results of the study show that Mahbub Djunaidi has the concept of *khittah plus*. Political democracy in the style of Mahbub Djunaidi is the ideal of democracy which is fought for through political lines.

Keywords: Mahbub Djunaidi, Political Democracy, Nahdlatul Ulama.

PENDAHULUAN

Nadlatul' Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertujuan memelihara, melestarikan, dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian martabat manusia (NU, 1926). Sebagai sebuah *jam'iyah* NU justru cukup dekat dengan aktivitas politik. Menurut Wahab Chasbullah, salah seorang tokoh pendiri NU, politik adalah alat untuk melindungi dan menjamin baik kepentingan NU maupun umat Islam pada umumnya. Dalam aktivitas politik, NU pernah bergabung dengan Partai Masyumi, yang didirikan melalui Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Partai Masyumi berdiri atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangannya melalui partai tunggal (Goncung, 2015). Namun keanggotaan NU di Partai Masyumi hanya bertahan selama 7 tahun.

Pemilu 1955 merupakan momentum NU untuk membuktikan diri memiliki basis massa yang besar. Dalam debutnya dikontestasi pemilu, NU meraih posisi ketiga dibawah PNI dan Masyumi. NU memperoleh total 6.955.141 (18,4%) suara (Marle, 1956). Pencapaian tersebut merupakan hasil yang luar biasa bagi sebuah partai politik debutan. Apalagi menurut penelusuran Herbert Feith, dibandingkan dengan partai-partai besar lain NU tidak banyak menggunakan surat kabar atau media cetak dalam mengkampanyekan dukungan (Feith, 1955: 36).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, NU berulang kali mendapatkan perlakuan tidak adil oleh pemerintah. Pemilu pertama di masa Orde baru, yaitu tahun 1971, Golkar berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 62,8% suara. Menurut Mahbub, kemenangan Golkar tidak begitu saja diraih tetapi dikarenakan adanya tindakan curang yang sistemik. Hasil pemilu 1971 tidak semata-mata tertuju pada hasil perhitungan suara saja, melainkan peristiwa-peristiwa di saat masa kampanye dan segala bentuk kekerasannya (Djunaidi, 2017: 7-8).

Pemilu 1971 adalah kontestasi politik terakhir yang diikuti oleh partai NU. Karena di tahun 1973 pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik. Sejak itu, kontestasi politik di Indonesia hanya diikuti oleh dua partai politik, yaitu PPP dan PDI, dan satu Golkar. Mahbub melanjutkan manifestasi politiknya

bersama PPP. Besama PPP, Mahbub kerap menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah baru yang dinilai kontra demokrasi. Kritik Mahbub dalam sebuah tulisan yang berjudul *Demokrasi Babi* berujung pada penangkapannya sebagai tahanan politik tepat di tanggal 11 April 1978. Jelang pemilu 1982 hubungan elit NU dengan PPP kian memanas. Ada upaya struktural yang dilakukan oleh Jailani Naro untuk menyingkirkan elit NU di PPP. Jailani Naro adalah wujud dari intervensi pemerintah Orde baru ke dalam tubuh PPP. Sampai pada akhirnya perpecahan di tubuh PPP tidak bisa dihindari lagi.

Pada Muktmara ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU mendeklarasikan diri keluar dari PPP. Dikesempatan yang sama, disepakai keputusan NU untuk kembali *khittah*. Akibat dari keputusan kembali ke *khittah* tidak hanya membuat NU melepaskan diri dari PPP, tetapi juga memaksa NU untuk menarik diri dari segala aktivitas politik praktis. Pasca melepaskan diri dari PPP, elit NU kemudian melakukan penggemosan terhadap PPP. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan pemilih PPP dari basis nahdliyin (sebutan untuk warga NU) bahwa NU sudah tidak lagi menjadi bagian dari tersebut. Salah satu elit NU yang aktif melakukan safari politik untuk menggemosi PPP adalah Mahbub Djunaidi. Penggemosan oleh elit NU tersebut berakibat pada anjloknya suara yang diperoleh PPP pada pemilu tahun 1987.

Meski demikian, Mahbub memiliki pemikiran agar NU tidak benar-benar meninggalkan politik praktis. Lebih lanjut, ide Mahbub adalah menginginkan agar NU kembali berjuang melalui partai politik yang menjadi representasi NU itu sendiri. Ide tentang agar NU tidak benar-benar meninggalkan politik praktis dituangkan oleh Mahbub melalui konsep *khittah plus*. Konsep *khittah plus* kemudian menjadi pembahasan utama dalam Konbes NU di Cilacap tahun 1987. Berdasarkan pemaparan narasi diatas, penelitian tentang pemikiran politik Mahbub Djunaidi pada tahun 1960-1987 menjadi menarik untuk dibahas, selain karena relevansi pemikiran politik Mahbub dengan situasi hari ini pun dapat dirasakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 2008: 8). Pada

tahap heuristik dilakukan pencarian dan mengumpulkan sumber atau data di Perpustakaan PBNU, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) serta perpustakaan pribadi milik keluarga Mahbub Djunaidi. Selain itu, juga diperoleh data dari hasil wawancara dengan Isfandari MD (putra Mahbub Djunaidi) dan Chatibuk Umam (pendiri Cabang PMII Ciputat).

Tahap Kedua adalah memverifikasi atau mengkritik sumber-sumber yang telah didapatkan. Pada tahap ini dilakukan dua cara, yaitu melakukan kritik ekstern, dan kritik intern untuk menguji kredibilitas dari sumber-sumber yang didapatkan. Tahap ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. Dan tahap keempat adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan ini adalah deskriptif-naratif yang berarti penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis fakta yang telah diolah ke dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khidmat Pergerakan Mahbub Djunaidi (1960-1967)

Mahbub Djunaidi, seorang putra asli Betawi Tanag Abang, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1933 (Djunaidi, 2020). Pemikiran politik Mahbub tidak bisa dilepaskan dari lingkungan tempat dimana ia tumbuh. Mahbub yang tumbuh dan besar di lingkungan suku Betawi daerah Tanah Abang, digambarkan oleh Isfandiari MD, memiliki prinsip egaliter dan jauh dari kesan feodalistik. Prinsip tersebut yang kemudian mendasari pemikiran demokrasi ala Mahbub dalam berpolitik (Djunaidi, 2020). Mahbub juga aktif dalam berbagai organisasi, yang menjadi tempat dalam mengaktualisasikan pemikiran politiknya.

Pendidikan SMA dilaksanakan di SMA Budi Utomo (sekarang SMAN 1 Jakarta). Mahbub menginisiasi berdirinya majalah *siswa* dan bertindak sebagai pemimpin redaksi majalah tersebut. Selain itu, Mahbub kemudian bergabung kedalam Ikatan Pelajar Nahdlatul' Ulama (IPNU). Menurut Said Budairy, Mahbub mengenal IPNU melalui A.A. Murtahdho, yang merupakan pimpinan IPNU Jakarta (Kompas, 1995). Selepas menamatkan sekolah di SMA Budi Utomo, Mahbub melanjutkan studi di

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah, Mahbub bergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, yang selanjutnya disebut dengan HMI. Capaian tertinggi Mahbub adalah menjadi ketua Departemen Pendidikan PB HMI 1957-1960. Adapun alasan bergabungnya Mahbub dengan HMI adalah karena organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah bagi mahasiswa Islam saat itu.

Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh Konbes IPNU pada tanggal 14-16 Maret 1960 di Yogyakarta, adalah kesepakatan untuk membentuk sebuah organisasi yang menjadi entitas kalangan mahasiswa NU yang terpisah secara struktural dengan IPNU (Alfas, 2015:2). Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, dipilih 13 orang dengan tugas melaksanakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Surabaya, ke-13 orang tersebut adalah: 1). Chalid Mawardi; 2). M. Said Budairy; 3). M. Sobich Ubaid; 4). M. Makmun Syukri B.A; 5). Hilman; 6). Isma'il Makky; 7). Munsif Nahrawi; 8). Nuril Huda Suaidy HA; 9). Laily Mansur; 10). Abd. Wahab Jailani; 11). Hisbullah Huda; 12). M. Cholid Narbuko; 13). Ahmad Husain.

Menurut Chatibul Umam, salah seorang pendiri Cabang PMII Ciputat, cabang tersebut dibentuk melalui ajakan pintu ke pintu dan penyebaran gagasan melalui tulisan dan diskusi. Sampai sekitar terkumpul 57 orang calon anggota sebelum dikirimkan surat permohonan pembentukan Cabang PMII Ciputat kepada PP PMII (Umam, 2020). Dalam momentum pengukuhan Cabang PMII Ciputat, Mahbub menyampaikan bahwa Ciputat merupakan cabang istimewa, disebabkan sebagai cabang pertama yang dikukuhkan oleh PP PMII.

Tahun pertama memimpin PMII, Mahbub mempersiapkan konsepsi, konsolidasi, memperkenalkan organisasi, dan mempersiapkan segala kebutuhan PMII menuju penyelenggaraan kongres pertama (Alfas, 2015:4). Satu tahun memimpin PMII dalam masa persiapan, Mahbub mengukuhkan 13 cabang baru di berbagai kabupaten/kota. Atas capaian tersebut, Mahbub membawa PMII menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang cukup disegani.

Pada tanggal 23-26 Desember 1961, PMII menyelenggarakan kongresnya yang pertama. Kongres I PMII bertempat di Tawangmangu, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kongres tersebut, dihadiri perwakilan 13 cabang PMII yang telah dikukuhkan. Melalui kongres ini PMII memberikan sebuah pernyataan sikap yang dikenal dengan sebutan

Deklarasi Tawangmangu. Deklarasi tersebut adalah sebuah pernyataan sikap dan prinsip organisasi PMII yang bersandar pada sosialisme Indonesia, pendidikan Nasional, kebudayaan Nasional, dan pertanggungjawaban sebagai generasi penerus bangsa. Deklarasi Tawangmangu adalah monument intelektual yang menjadi kontribusi pemikiran Mahbub sebagai ketua umum PMII. Dalam kongres tersebut, Mahbub kembali terpilih sebagai ketua umum PMII meski tanpa mencalonkan diri. Menurut Said Budairy, Mahbub sama sekali tidak mengkampanyekan diri apalagi hingga mendirikan posko pemenangan di sekitar area kongres (NU Online, 2013).

Menurut Chalid Mawardi, konsep Deklarasi Tawangmangu seratus persen disusun oleh Mahbub Djunaidi (Budairy (ed.), 2001:155). Pernyataan sikap dan prinsip PMII yang tertuang pada Deklarasi Tawangmangu meninggalkan jejak tentang pemikiran Mahbub Djunaidi sebagai perumus deklarasi tersebut. Melalui Deklarasi Tawangmangu, Mahbub memperkenalkan apa yang disebut dengan sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia dipilih oleh Mahbub dalam menyatakan sikap bahwa prinsip keberpihakan PMII adalah kepada rakyat. Sosialisme Indonesia menjadi pengejawantahan daripada UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Sosialisme Indonesia dalam artian struktur adalah terwujudnya pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Sosialisme Indonesia dalam artian moral tidaklah lain daripada sosialisme yang berdiri secara khidmat di atas falsafah pancasila. Sosialisme Indonesia berarti bersikap dan bertindak sesuai garis tuntunan Allah swt, cenderung tinggi nilainya dan tidak mungkin ditanggihkan lagi (Tawangmangu, 1961). Atas dasar bahwa Deklarasi Tawangmangu dirumus seratus persen oleh Mahbub Djunaidi, maka bisa dikatakan bahwa sosialisme Indonesia adalah salah satu ciri dari visi politik Mahbub Djunaidi.

Menurut Ahmad Bagdja, manifesto kesimpulan Ponorogo adalah murni pemikiran dan sumbangan Mahbub terhadap organisasi. Melalui kesimpulan Ponorogo, Mahbub memberikan pedoman terhadap ciri seorang kader PMII. Ciri yang dimaksud adalah seorang kader harus memiliki kecakapan ilmu, mengamalkan ilmu, dan menggunakannya demi kepentingan membangun bangsa (Bagdja, 2016). Pada akhir tahun 1963, PMII menyelenggarakan kongresnya yang kedua pada tanggal 25-29 Desember 1963 bertempat di Kaliurang, Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri

sebanyak 31 cabang PMII dari berbagai kabupaten/kota. Pada momentum kongres tersebut juga diperkenalkan *Mars PMII* sebagai lagu resmi organisasi. Lirik mars PMII diciptakan langsung oleh Mahbub Djunaidi. Menurut Chalid Mawardi, lirik mars PMII adalah bukti lain visi sosialisme Mahbub Djunaidi (Budairy (ed.), 2001:154). Melalui kongres tersebut, Mahbub kembali dipercaya untuk melanjutkan peran sebagai ketua umum PMII periode selanjutnya.

PMII tegas menetapkan bahwa ilmu harus diamankan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Bagi PMII organisasi tidak lebih sebagai alat perjuangan, sedang berpolitik tak lain untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dalam perjuangan mengabdikan diri pada agama, bangsa, dan negara. Dibawah kepemimpinannya, Mahbub membawa PMII pada prinsip partisipasi politik aktif, utamanya tentu dalam perkembangan partai NU.

Pengabdian Mahbub sebagai ketua umum PMII berakhir di tahun 1967. Kongres III PMII yang diselenggarakan pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur, dihadiri sebanyak 75 cabang. Melalui kongres ini, Zamroni terpilih sebagai ketua umum PMII selanjutnya. Atas keputusan tersebut, maka purna sudah amanah Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum PMII.

Khidmat Jam'iyah Mahbub Djunaidi (1967-1971)

Pada tahun 1960 selain terpilih sebagai ketua umum PMII, Mahbub juga diamanatkan menjadi salah satu perwakilan partai NU sebagai anggota DPR/GR. Selama duduk sebagai anggota parlemen, menurut Isfandiari MD, Mahbub justru dikenal dekat dengan kader PKI, salah satunya adalah Njoto (Djunaidi, 2021). Bahkan, Njoto menyumbangkan ide untuk judul hasil terjemahan Mahbub terhadap buku *Animal Farm* karya George Orwell. Buku terjemahan tersebut diberi judul *Bintanagisme* yang merupakan ide dari Njoto.

Setelah purna sebagai ketua umum PMII, Mahbub melanjutkan pengabdian sebagai seorang kader NU dengan ikut mengurus GP Ansor. Mahbub bergabung dengan kepengurusan pusat GP Ansor hasil kongres ke-7 yang berlangsung tanggal 23-28 Oktober 1967 di Jakarta. Di Ansor. Dalam khidmatnya bersama Ansor, Mahbub tidak banyak bergelombang seperti sebelumnya saat ia menahkodai PMII. Terlebih di

saat yang sama Mahbub sedang menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal PBNU. Dalam perjalanannya yang singkat bersama Ansor, Mahbub memberikan sumbangsinya dengan menyusun lirik lagu mars Ansor.

Muktamar XXIV NU berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4-10 Juli 1967. Melalui Muktamar ini, NU meninjau ulang demokrasi terpimpin. Bukan pada substansi tetapi pada istilah serta bentuk penerapannya (NU Online, 2016). Bagi NU penerapan demokrasi di Indonesia harusnya bersumber pada Pancasila, sebagai ideologi bangsa. Maka NU menawarkan istilah Demokrasi Pancasila sebagai pengganti dari Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Pancasila pada prinsipnya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebebasan berdemokrasi dibatasi oleh *pertama*, batas keselamatan negara; *kedua*, kepentingan rakyat banyak; *ketiga*, kepribadian bangsa; *keempat*, batas kesusilaan; dan *kelima*, batas pertanggungjawaban pada Tuhan. Setiap keputusan yang melanggar kelima batas itu dinyatakan batal secara moral dan politik (Pancasila, 1967). Komitmen NU terhadap Demokrasi Pancasila adalah salah satu bukti bahwa Mahbub tumbuh di lingkungan yang tepat. Demokrasi Pancasila hasil Muktamar XXIV adalah definisi yang tepat untuk menggambarkan demokrasi yang di cita-citakan oleh Mahbub Djunaidi.

Mahbub Djunaidi turut membidani persiapan NU dalam menghadapi pemilu tahun 1971. Pada tanggal 5 Juli 1971. Diselenggarakan pemilu serentak untuk memilih anggota-anggota DPR dan DPRD. Sebagai sebuah partai debutan, Golkar menang telak dengan perolehan 62,8% (34.348.673) suara. Disusul oleh NU ditempat kedua yang memperoleh 18,68% (23.741.749) suara. Sementara PNI, yang merupakan pemenang pemilu 1955, menempati posisi ketiga dengan perolehan 15,39% (11.329.905) suara.

Mahbub Djunaidi, yang saat itu menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal partai NU, mengkritik hasil pemilu 1971 sebagai sebuah kecurangan. Dalam kolom berjudul *Rujuk Masyarakat 1971* ia menggambarkan bagaimana situasi pasca pemilu (Djunaidi, 2017:8). Setelah hasil perhitungan suara diumumkan, sekretaris jenderal NU, Yusuf Hasyim, menyiapkan draf pernyataan sebagai reaksi terhadap hasil akhir pemilu 1971. Draf tersebut berisi pernyataan bahwa NU tidak menerima hasil pemilu

yang dianggap kurang bisa meyakinkan dan juga membeberkan bagaimana peristiwa-peristiwa saat kampanye dan minggu tenang sebelum hari pemungutan suara.

Mahbub mengajak seluruh kader NU untuk memboikot hasil pemilu 1971. Menurut Mahbub, dalam melakukan penolakan tentu tidak bisa separuh. Mahbub mengajak seluruh kader NU untuk menolak duduk di DPR. Namun ternyata justru Mahbub mendapatkan kekecewaannya. Draf pernyataan yang telah dipersiapkan kepada publik, tidak pernah sampai untuk dikeluarkan. Kader-kader terpilih sebagai perwakilan NU di DPR tetap berdatangan ke Jakarta.

Manifestasi Politik Mahbub Djunaidi (1973-1984)

Pemilu 1971 adalah kontestasi terakhir yang diikuti oleh NU sebagai partai politik. Karena di tahun 1973, diberlakukan kebijakan penyederhanaan partai politik. Bersama Parmusi, PSII, dan Perti, NU kemudian tergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dibentuk pada tanggal 5 Januari 1973. Terbentuknya PPP di deklarasikan oleh lima orang deklaratör. Kelima orang deklaratör tersebut adalah KH. Idham Chalid (ketua umum PBNU), H. Mohammad Syafa'at (ketua umum Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (ketua umum PSII), H. Rusli Halil (ketua umum PERTI), dan H. Masykur (ketua fraksi persatuan pembangunan).

Mahbub Djunaidi, pernah menuliskan dalam sebuah kolom bagaimana proses musyawarah mufakat pemilihan ka'bah sebagai lambang resmi PPP. Kesulitan yang dialami saat proses menggodok lambang untuk PPP adalah kemungkinan terciptanya sebuah lambang yang mewakili identitas NU, Parmusi, PSII, dan PERTI itu sendiri (Djunaidi, 2018:244). Ditengah kebuntuan tersebut *Rais 'Aam* NU, Bisri Sansuri, maju ke depan dan mengambil kebijaksanaan, "*Bagaimana kalau ka'bah saja yang jadi lambang PPP?*". Usul tersebut diterima oleh seluruh hadirin. Ka'bah yang merupakan simbol suci umat Islam, di rasa tepat sebagai logo PPP yang lahir atas restu para bekas partai politik islam.

Menghadapi pemilu 1977, Mahbub ambil bagian menjadi calon anggota legislatif PPP dari daerah pemilihan Timor Timur. Daerah tersebut memiliki mayoritas penduduk yang beragama non muslim, yang artinya bukan konstituen dari PPP. Terlebih sebagai salah satu daerah terpencil saat itu, Timor Timur merupakan

basis besar pendukung Golkar. Ketika calon legislatif lain berlomba-lomba untuk menang dengan menyusun segala strategi terbaiknya, apa yang dilakukan oleh Mahbub justru menarik. Dengan maju sebagai calon legislatif dari PPP melalui daerah pemilihan Timor Timur, bisa dikatakan sama dengan memilih kekalahan.

Pemilu tahun 1977 diselenggarakan tanggal 2 Mei. Pemilu 1977 menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelses daftar. Yang dimaksud perwakilan berimbang adalah partai akan menentukan daftar calon. Secara keseluruhan PPP hanya mampu meraih 29,9% suara. Golkar keluar sebagai pemenang dengan raihan 62,1% suara, sementara PDI hanya berhasil meraup 8,6% suara (Haris, 1991:13). Sementara untuk pencalonan Mahbub sendiri, hasilnya pun bisa ditebak. Mahbub gagal melaju sebagai anggota legislatif. Belakangan diketahui, pencalonan Mahbub melalui daerah pemilihan Timor Timur adalah bentuk kritiknya terhadap proses Pemilu 1977 yang ia nilai jauh lebih main-main ketimbang pencalonannya sebagai calon anggota legislatif melalui daerah pemilihan Timor Timur (Djunaidi, 2021).

Sebelum dan setelah pemilu 1977 berakhir Mahbub aktif mengelilingi berbagai perguruan tinggi untuk menghadiri forum-forum akademik dan diskusi terbuka. Kegiatan Mahbub mengelilingi perguruan tinggi ini kemudian dikenal dengan safari kampus. Mahbub kerap menyuarakan propaganda kritiknya terhadap pemerintah orde baru. Bahkan menurut Mahfud MD, salah seorang aktivis mahasiswa tahun 1978, Mahbub merupakan sosok yang memantik gerakan mahasiswa tahun 77-78 (Mahfud MD, 2016).

Satu yang paling menyita perhatian adalah surat kabar Kompas yang memuat tulisan berjudul *Demokrasi Babi* milik Mahbub. Babi dijadikan representasi keserakahan pemerintah orde baru. Setelah tulisan tersebut di muat, surat kabar Kompas kemudian dibredel oleh pemerintah orde baru. Konfrontasi Mahbub yang konsisten terhadap pemerintah orde baru membuat dirinya dikenal salah satu yang paling lantang meneriakkan kritik terhadap pemerintah. Suatu malam di kota Bandung, kediaman Mahbub digerus oleh puluhan orang tentara. Puluhan orang tentara tersebut bermaksud menangkap Mahbub. Malam itu, tepat tanggal 11 April

1978 Mahbub ditangkap atas tuduhan subversif terhadap pemerintahan orde baru (Djunaidi dan Rasta, 2016:10).

Khittah NU (1984)

Jelang pemilu 1982, situasi internal PPP pun semakin memanas. Rentetan konflik internal berujung pada ancaman dari elit NU seperti Abdurrahman Wahid, Saifuddin Zuhri, dan Jusuf Hasjim menjelang pemilu 1982 yang mengancam akan melepaskan diri dari PPP. Puncak dari konflik internal tersebut adalah ketika Jailani Naro, ketua umum PPP, mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota PPP untuk pemilu 1982 secara sepihak (Haris, 1991: 54-55).

Pada tahun 1984, NU benar-benar melepaskan diri dari PPP. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Mukhtar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo. Mukhtar ke-27 ini menyepakati beberapa poin, yang antara lain: 1). Menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar organisasi NU; 2). Pemulihan keutamaan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Syariah atas Tanfidziah dalam status dan hukum; 3). Penarikan diri dari politik praktis dengan cara melarang pengurus NU secara bersama memegang kepengurusan di dalam partai politik; 4). Pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang non politik (Anam, 2010:30).

Mukhtar ke-27 NU menjadi barometer kehidupan organisasi untuk melepaskan diri dari kepentingan politik. Dimana salah satu keputusan dalam Mukhtar tersebut adalah pemulihan dan memperkuat kembali posisi ulama serta memperbarui komitmen NU sebagai organisasi keagamaan. Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan kembali ke *khittah* 1926.

Pengertian Khittah yang sebenarnya disebutkan dalam keputusan Mukhtar XXVII NU No:02/MNU-27/1984, adalah:

- a. Khittah Nadlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan

- b. Landasan tersebut adalah paham Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan
- c. *Khittah Nahdlatul Ulama* juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmah nya dari masa ke masa (NU, 1984).

Menurut penuturan Kacung Marijan, seperti yang dikutip oleh Edi Eka Setiawan, PBNU mengeluarkan kebijakan larangan rangkap jabatan di bidang politik dan sosial, melalui SK No.01/PBNU/I-1985 tertanggal 11 Januari 1985. Muktamar ke-27 NU di Situbondo dan SK yang dikeluarkan oleh PBNU tertanggal 11 Januari 1985 tentang perangkapan jabatan merupakan pemutus tali hubungan NU dengan PPP secara organisatoris. Kepemimpinan Jailani Naro yang dinilai otoriter dan sangat merugikan NU merupakan awal kekecewaan NU sebelum memutuskan keluar dari PPP (Setiawan, 2018:52-53).

Setelah NU keluar dari PPP, dikenal aktivitas penggemboan terhadap PPP oleh aktivis dan elit NU. Salah satu tokoh NU yang melakukan penggemboan adalah Mahbub Djunaidi. Mahbub tidak hanya melakukan penggemboan secara lisan di depan massa NU di berbagai tempat, tetapi juga melakukannya melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan majalah. Dalam beberapa tulisannya itu, Mahbub menyerang Jailani Naro dan PPP yang dianggap tidak tahu diri karena masih mengklaim PPP sebagai wadah politik Islam, padahal NU sebagai pendukung yang terbesar telah menarik diri (Haris, 1991:118-119).

Mahbub melakukan safari politik ke pusat-pusat basis massa pendukung NU di daerah-daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai organisasi tradisional, basis massa NU banyak terdapat di pesantren-pesantren. Safari politik yang dilakukan Mahbub adalah dengan meyakinkan para pendukung NU bahwa NU sudah tidak lagi menjadi bagian dari PPP .

Khittah Plus (1987)

Ide dasar konsep *khittah plus* yang digagas Mahbub adalah keinginan agar NU kembali mendirikan partai politik. Mahbub beranggapan bahwa NU dengan basis massa yang besar, hanya menjadi perawan yang ditarik kesana kemari dalam setiap

kontestasi pemilu. Konsep *khittah plus* kemudian menjadi pembahasan utama dalam Konbes NU yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 November 1987 bertempat di Cilacap, Jawa Tengah.

Pembahasan utama dalam Konbes itu adalah tentang gagasan *khittah plus* NU. Dukungan terhadap *khittah plus* datang dari politisi NU yang menginginkan kembali terjun kedalam aktivitas politik praktis. Sedangkan kelompok yang menolak adalah para tokoh NU yang ingin mengembalikan NU ke garis perjuangan dengan keputusan *khittah* 1926 (Setiawan, 2018:62). Adapun Mahbub, tidak menginginkan NU melepaskan keterkaitan dari dunia aktivitas politik secara organisatoris, beranggapan bahwa politik adalah jalan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Namun, keinginan Mahbub agar NU kembali mendirikan partai politik akhirnya gugur dan tidak dapat disepakati dalam Konbes NU tersebut. Pemikiran Mahbub bertentangan dengan rekayasa politik Orde Baru dan UU partai politik yang hanya memperbolehkan dua partai politik dan satu Golkar. Akhirnya dalam Konbes itu juga ditegaskan, dengan adanya keputusan itu PBNU menganggap selesai persoalan perbendaan pandangan yang ada (Setiawan, 2018: 62-79).

Meski layu sebelum berkembang, konsep *khittah plus* yang digagas oleh Mahbub merupakan suatu monumen intelektual penting yang didedikasikan Mahbub terhadap *jam'iyah* NU. *Khittah plus* menunjukkan konsistensi Mahbub dalam berpolitik dan mengedepankan kepentingan ummat. Itulah Mahbub Djunaidi, sang aktivis politik NU.

Demokrasi Politik Ala Mahbub Djunaidi

Menurut Chalid Mawardi, Mahbub Djunaidi adalah seorang yang mempunyai visi politik. Setidaknya menurut Chalid Mawardi, terdapat tiga poin dalam mendefinisikan visi politik seorang Mahbub Djunaidi. *Pertama*, visi tentang sosialisme. Mahbub adalah seorang revolusioner, karena ia percaya kepada *macht forming* dan *macht anwending* untuk mewujudkan cita-cita revolusi. *Kedua*, visi tentang nasionalisme. Nasionalisme bagi Mahub sangat berbeda dengan *chauvinisme*. *Ketiga*, visi tentang Agama. Mahbub kerap memberikan kritik terhadap kultur-kultur

NU antara relasi santri dengan kiai yang dinilai bernuansa feodalistik (Budairy (ed.), 2001: 158).

Sebagai seorang pejuang demokrasi, menurut Isfandiari MD, pemikiran demokrasi Mahbub Djunaidi tidak bisa dipisahkan dari latar belakang Mahbub sebagai seorang yang berasal dari suku Betawi Tanah Abang. Menurut Isfandiari, Mahbub tumbuh dan besar di lingkungan Betawi Tanah Abang yang kental akan prinsip egaliter dan apa adanya. Demokrasi bagi Mahbub adalah demokrasi yang dijalankan dengan nyaman, dan memegang teguh prinsip egaliter.

Dalam aktualisasinya, cita-cita demokrasi yang diperjuangkan oleh Mahbub adalah tafsiran terhadap Demokrasi Pancasila yang dirumuskan dalam Mukhtamar NU tahun 1967 di Bandung. Demokrasi Pancasila pada prinsipnya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebebasan berdemokrasi dibatasi oleh *pertama*, batas keselamatan negara; *kedua*, kepentingan rakyat banyak; *ketiga*, kepribadian bangsa; *keempat*, batas kesusilaan; dan *kelima*, batas pertanggung-jawaban pada Tuhan.

Dengan demikian, Demokrasi Politik ala Mahbub Djunaidi adalah cita-cita terhadap demokrasi yang diperjuangkan melalui garis politik. Namun yang menjadi menarik, praktis satu-satunya jabatan politik yang pernah diraih oleh Mahbub adalah ketika menjadi anggota DPR/GR tahun 1960-1971. Itulah Mahbub Djunaidi, aktivis politik NU.

KESIMPULAN

Mahbub Djunaidi adalah seorang aktivis politik NU. Pada periode tahun 1960-1987, Mahbub Djunaidi menjadi Ketua Umum PMII (1960-1967), Wakil Sekretaris Jenderal PBNU (1967-1982), Wakil Sekretaris Jenderal PPP (1973-1984), Wakil Ketua Umum PBNU (1982-1987), dan Wakil Majelis Pertimbangan PPP (1984-1989). Demokrasi Politik ala Mahbub Djunaidi adalah cita-cita terhadap demokrasi yang diperjuangkan melalui garis politik. Selain itu, ia mengembangkan konsep *khittah plus* yang diinisiasi pada tahun 1987 adalah wujud dari konsistensi politik seorang Mahbub Djunaidi. Selain sebagai aktivis, Mahbub Djunaidi adalah seorang penulis

Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10(2), 159-174, Agustus 2021

yang terkemuka. Karya tulisnya menjadi salah satu 'senjata' mengkritik pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfas, F. (2015). *PMII Dalam Simpul-Simpul Perjuangan*. Jakarta: PB PMII.

Anam, C. (1999). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bima Satu.

Anam, C. (2010). *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa, Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978*. Jakarta: Duta Aksara Mulia.

Budairy, S. (2001). *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik Dari Kalangan NU Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

Djunaidi, M. (2017). *Politik Tingkat Tinggi Kampus*. Malang: Literasi Nusantara.

Djunaidi, M. (2018). *Humor Jurnalistik*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Gonceng, N. (2015). Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol. 1 (1), 61-74.

Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Harris, S. (1991). *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.

MD, I., & Rasta, I. (2017). *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Setiawan, E., E. (2016). *Mahbub Djunaidi (Studi Tentang Pemikiran Khittah Plus NU Tahun 1987)*. (Surabaya: Skripsi. UIN Sunan Ampel)

Setiawan, E. E. (2018). *Mahbub Djunaidi dan Khittah Plus NU*. Tuban: CV Karya Litera Indonesia.

Surat Kabar

Tempo. *Khittah Plus*. 7 November 1987.

Kompas. *Mengenang H. Mahbub Djunaidi, Konsisten, Santai, Kocak*.
25 Oktober 1995

Wawancara

Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10(2), 159-174, Agustus 2021

Djunaidi, Isfandiari Mahbub. *Putra Mahbub Djunaidi*, dilakukan di Tangerang pada 13 Januari 2021.

Umam, Chatibul. *Pendiri PC PMII Ciputat*, dilakukan di Ciputat pada 5 September 2020..